

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

KHAERUL MUBARAK

E051181504



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SOPPENG

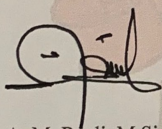
Disusun dan diajukan oleh
KHAERUL MUBARAK
E051181504

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

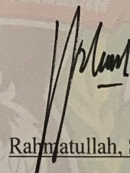
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001



Rahmatullah, S.IP, M.Si.

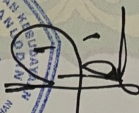
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SOPPENG


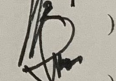
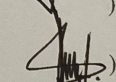
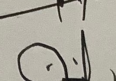
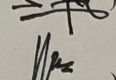
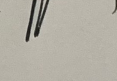
Dipersiapkan dan di susun oleh

KHAERUL MUBARAK
E051181504

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 18 Januari 2024

Menyetujui,

Ketua	: Dr. A. M. Rusli, M.Si .	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si	()
Anggota	: Saharuddin, S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Dr. A. M. Rusli, M.Si .	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()

PANITIA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAERUL MUBARAK

Nim : E051181504

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Judul Skripsi : “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SOPPENG”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 JANUARI 2024



KHAERUL MUBARAK

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAC.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Konsep Peran	14
2.2. Konsep Pemerintahan.....	17
2.3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
2.4. Konsep Kepariwisata	25
2.5. Konsep Pengembangan.....	32
2.6. Pengembangan Pariwisata	33
2.7. Konsep Desa Wisata	37
2.8. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata.....	43
2.9. Kerangka Pikir	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
3.1. Tipe Penelitian.....	46
3.2. Lokasi Penelitian	47
3.3. Sumber Data	47
3.4. Informan.....	48

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6. Fokus Penelitian.....	50
3.7. Analisis Data.....	52
BAB IV	54
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	54
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng	54
4.1.1. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng.....	55
4.2. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng.....	81
4.2.1. Pembangunan Desa	83
4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Soppeng	101
BAB V	110
V.I. Kesimpulan	110
VII. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
4.1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Bulue	70
4.2. Sumber Daya Alam Desa Mattabulu.....	79
4.3. Potensi Wisata Desa Mattabulu.....	95
4.4. Fasilitas Desa Wisata Mattabulu.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
2.1. Kerangka Pikir	45
4.1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	54
4.2. Struktur Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.....	64
4.3. Profil BUMDES Desa Matabulu.....	89
4.4. Modal BUMDES Desa Matabulu.....	90
4.5. Perbandingan isi website desa wisata Rintisan Desa Bulue dan Matabulu.....	98
4.5. Promosi Wisata melalui website.....	100

ABSTRAC

Khaerul Mubarak, Student Identification Number E051181504, Bachelor of Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a Thesis entitled The Role of Local Government in Tourism Development in Soppeng Regency, under the guidance of Mr. Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si as supervisor I and Mr. Rahmatullah., S.IP., M.Si as supervisor II.

This study aims to find out how the role of the Tourism, Youth and Sports Office of Soppeng Regency in the development of Tourism Villages and the factors that influence it. To achieve this goal, qualitative research methods are used using descriptive data. Data collection techniques are observation, interviews, as well as documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed that the Role of Local Government in Tourism Development in Soppeng Regency from where the Regional Regulation of Soppeng Regency Number 2 of 2019 concerning Tourism Villages from the aspect of tourism village development consists of Tourism Village Institutions, Tourism Village Objects, Tourism Village Marketing, has been running well. From the aspect of Tourism Village Institutions in Mattabulu and Bule villages, Village-Owned Enterprises (BUMDES) and Pokdarwis institutions have been formed that manage tourism villages, while the tourist village objects of each village have their own charms both natural attractions and cultural tourism objects, while the marketing of tourism villages is carried out by all stakeholders, both district governments who carry out promotions in the form of advertisements and direct promotions in the form of introduction of tourist objects in Soppeng Regency and the village government promote through official website accounts and social media such as Instagram, Facebook, and Twitter of each village. While the influencing factors include supporting factors, namely support from the village government and the establishment of tourist destination development institutions, while the inhibiting factors are budget and human resource limitations.

Keywords: *Role, Tourism Village Development, Soppeng Regency*

ABSTRAK

Khaerul Mubarak, Nomor Induk Mahasiswa E051181504, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah.,S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam pengembangan Desa Wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng dari sebagai mana peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata dari aspek pembangunan desa wisata terdiri dari Kelembagaan Desa Wisata, Objek Desa Wisata, Pemasaran Desa Wisata, telah berjalan dengan baik. Dari aspek Kelembagaan Desa Wisata di desa mattabulu dan bulue sudah terbentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pokdarwis yang mengelola desa wisata, sementara objek desa wisata masing-masing desa memiliki daya tarik tersendiri baik objek wisata alam maupun objek wisata budaya, sedangkan pemasaran desa wisata dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah kabupaten yang melakukan promosi dalam bentuk iklan maupun promosi langsung dalam bentuk pengenalan objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng serta pemerintah desa melakukan promosi melalui akun Website resmi maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter masing-masing desa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor pendukung yakni Dukungan dari pemerintah desa dan Terbentuknya kelembagaan pengembangan destinasi wisata sedangkan faktor penghambatnya yaitu Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: *Peran, Pengembangan Desa Wisata, Kabupaten Soppeng*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah *rabbil 'alamiin*, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Soppeng”**. Shalawat besertakan salah juga tidak lupa dihaturkan kepada junjungan segala umat, nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan Sebagian persyaratan untuk menyandang gelar sarjana dalam hal ini Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Penulisan skripsi ini disadari masih belum sempurna, terdapat kekurangan-kekurangan yang dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini tidaklah muda, banyak pengetahuan baru dari hasil pencarian kebenaran karena kesulitan, cobaan dan tantangan-tantangan yang datang sejak awal hingga penyelesaian penulisan, tetapi alhamdulillah penulis tetap pantang menyerah dan tidak berputus asa berkat keteguhan pada keyakinan dan juga dorongan positif dari berbagai pihak. Skripsi adalah pencapaian yang

besar untuk banyak pihak juga menyandang sarjana adalah mimpi banyak orang, maka dari itu penulis sangat bersyukur atas pencapaian ini.

Pada kesempatan yang luar biasa ini, penulis menyampaikan kepada orang tua tercinta sebesar-besarnya terima kasih penghargaan setinggi-tingginya dan memohon maaf atas segala kekurangan penulis belum bisa membahagiakan kedua orang tua untuk ayahanda **Burhan** dan Ibunda **Anismawati** yang telah melahirkan, merawat, dan menjaga hingga tumbuh dengan memberikan lingkungan yang sangat bermakna, pelajaran hidup yang tidak terhingga, kesabaran dan keikhlasan, tumbuh dengan kedewasaan, Pendidikan di keluarga kecil yang sangat berharga untuk hidup penulis, menikmati hidup dengan penuh lika-liku hingga penulis sadar ternyata untuk menjadi manusia seutuhnya, banyak pengalaman yang harus dirasakan. Tumbuh dengan cukup kasih sayang dan nasehat kepada penulis adalah bekal utama dalam menjalani hidup penulis, terlebih perhatian penuh yang diberikan adalah energi yang tidak pernah habis yang penulis peroleh. Terima kasih, do'a, nasihat, perhatian dan materi yang diberikan sangat mendukung perjalanan penulis. Semoga sehat dan kehidupan ayahanda dan ibunda diberkati dan selalu dalam perlindungan-Nya. Dan terima kasih kepada adik saya yang tercinta **Mujibah Ainul Khaerah** yang telah bahagia di alam sana. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrative serta dorongan dan semangat untuk memberikan perhatian lebih pada tugas akhir ini (skripsi).
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, memberikan waktu luang untuk membimbing penulis, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi kemudahan pada setiap permasalahan dalam penulisan ini hingga mengantarkan penulis menyandang gelar sarjana, penulis sangat-sangat berterima kasih semoga kebaikan selalu menyertai dan bapak Rahmatullah S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dari penulis hanya bermodalkan judul dan pengetahuan yang sangat minim hingga menjadi paham akan arah penelitian dan hasilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu kedepan, akan lebih banyak lagi tantangan dan hal baru yang

akan penulis temui, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama penulis menyandang status mahasiswa tetap awet dan dapat dikembangkan sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan yang baru bagi penulis. Terima kasih dan semoga perlindungan dari yang maha kuasa selalu menyertai bapak.

5. Para tim penguji, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si., dan bapak Saharuddin, S.IP, M.Si yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan sehingga pikiran penulis lebih terbuka dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Pak Mursalim, S.IP dan Pak Mardi Ibu Hasnawati, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua elemen yang terlibat dalam memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yakni informan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Soppeng Ibu Dra. Suriasni M,Pd selaku kepala dinas beserta staf dan jajarannya. terima kasih kepada bapak Ukkas selaku sekertaris Desa Bulue, dan Bapak Ali

selaku ketua Pokdarwis desa Bulue yang telah memberikan informasi tentang desa Bulue. Dan terima kasih kepada bapak Abdul Kadir selaku sekertaris Desa Mattabulu yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis.

9. Kepada keluarga Ibu Murniati, Ilfa Zahrani Jalil, Aan Andarmawan, Aksa, serta bapak Jalil Almarhum yang telah menemani, merawat selama penulis menempuh pendidikan di Makassar dari SMP sampai kuliah.
10. Kepada Keluarga Mahasiswa (KEMA) FISIP UNHAS, terima kasih telah menyediakan wadah belajar kepada penulis. Semoga kedepannya Bersama, Bersatu, Berjaya semakin melekat pada identitas kader KEMA FISIP UNHAS.
11. Kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP UNHAS, Terima kasih telah menjadi rumah serta menjadi ruang belajar seluas-luasnya bagi penulis dalam proses pengembangan diri. Bumi Orange telah mengambil ruang dalam memori yang tidak akan penulis lupakan. Kedepannya, semoga Bumi Orange akan terus tumbuh seiring dengan Militansi yang melekat pada jiwa-jiwa kader Merdeka. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita.
12. Kepada ELEFThERIA (Eletheria I Thanatos / Kebebasan atau kematian) yang selalu mengingatkan penulis terhadap filosofi menolak mati sebelum merdeka yang juga menjadi ruang orang

mahasiswa ilmu pemerintahan UNHAS 2018 berkumpul dan belajar. Penulis berharap, tidak hanya sebatas nama namun ELEFThERIA dapat mengingat sebab dan karena apa ia ada. Meski singkat, tapi semuanya sangat berkesan. Terima kasih ELEFThERIA.

13. Terima kasih yang tak terhingga kepada saudara Malla, Adam, Richal, Ocid, Mallarangen, Rais, Sulhan, Made, Carlos, Gispa, Wahyudi, Adrian, Ismail, Fatur, Ilham yang telah membersamai dan menemani penulis dari mahasiswa baru sampai tiada hentinya.

14. Terima kasih kepada saudara Habib, Asrul, Appy, Haswinardi, Ferdhy, Syukur, Andrydodo, Haikal, Oghy, Ardy, Syarif, Rafly, Jamil Ismail yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

15. Dan Terima kasih kepada yang terkasih Ditha Amanda yang telah memberikan dukungan dan menemani serta sahabat penulis Ifho dan Bogar.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan segala bentuk doa, dukungan dan pelajaran, tanpa kalian penulis tidak dapat sampai pada titik pencapaian ini.

Makassar, Januari 2024

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan wisata melimpah mampu mengatasi masalah-masalah mendasar dengan penguatan ekonomi dari penerimaan devisa/pendapatan daerahnya, dengan itulah Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman melimpah dapat mengembangkan potensinya, misalnya dari segi pariwisata sebab wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencari atau menikmati keindahan wisata Indonesia sehingga memberikan efek domino bagi dalam maupun luar negeri, bila dari luar negeri negara kita semakin terkenal maka bagi dalam negeri negara kita dapat menambah devisa guna mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada saat ini. Tidak heran bahwa hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpotensi tinggi dalam hal perairan utamanya menyangkut dengan potensi wisatanya.

Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Dari hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak Negara Indonesia. Pariwisata suatu wilayah dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya.

Umumnya pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan meninggalkan tempat semula dalam sementara waktu tetapi hanya untuk berekreasi dan bukan untuk mencari nafkah atau berbisnis. Menurut Anuar et al. (2011:148) orang yang meninggalkan rumahnya untuk berekreasi ke suatu tempat serta mengeluarkan uang adalah wisatawan. Strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan mempromosikan potensi pariwisata pada suatu daerah. Binns et al. (2002:237) menyatakan pemerintah perlu terfokus untuk mempromosikan pariwisata, karena sektor pariwisata berpotensi sebagai pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata adalah sektor terintegrasi meliputi keindahan pemandangan, tempat arkeologi dan sejarah, budaya, social politik serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Dwyer and Spurr (2009:15) pariwisata adalah kekuatan global untuk pembangunan ekonomi dan regional, pengembangan pariwisata membawa serta campuran manfaat dan biaya dalam bidang pertumbuhan ekonomi pariwisata. Pariwisata juga merupakan salah satu industri terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata. Pertumbuhan ekonomi biasanya sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di suatu negara (Kesuma, 2015:102). Pariwisata juga merupakan salah satu industri paling cepat dalam menyediakan peluang kerja,

perolehan, serta akan mampu menghidupkan sektor produksi lain di suatu daerah pariwisata (Waskito, 2013:16).

Dampak positif dari pariwisata terhadap pembangunan ekonomi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan bagi negara serta distribusi pembangunan. Efek negatif dari pariwisata akan pembangunan ekonomi yaitu kebocoran pendapatan serta pekerjaan yang bersifat musiman. Menurut Lie (2004:3), berkembangnya industri pariwisata di suatu daerah hanya bergantung terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung. Kunjungan wisatawan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dari industri pariwisata yang dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah serta masyarakat. Disamping itu perkembangan pariwisata juga akan memberi efek tidak langsung kepada masyarakat. Menurut Samimi (2011:29), pada negara berkembang, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekspor yang sangat signifikan.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang baik, maka pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada

Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang ada didaerahnya masing-masing.

Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan baik negara maupun daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Hal ini mendorong beberapa daerah mulai melirik untuk mengembangkan kawasan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk peningkatan ekonomi daerah.

Demi mencapai sebuah keberhasilan dalam pengembangan wisata perlu dilakukan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta usaha kepariwisataan yang kecil, menengah, dan besar agar saling menunjang.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam undang-undang tentang kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diharapkan menekankan asas berkelanjutan yang berbasis lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan industri pariwisata khususnya terhadap lingkungan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata, ini dilihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara

dan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan, maka perkembangan di bidang pariwisata pun mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pembangunan prasarana dan sarana wisata seperti pembangunan hotel, bertambahnya travel agen, dijadikannya Bandar Udara Sultan Hasanuddin sebagai bandar udara internasional dan makin dikembangkannya tempat-tempat wisata lainnya. Dalam upaya untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Sulawesi Selatan berusaha meningkatkan citra positif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau potensi pariwisata yang dimilikinya. Selain upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata dan kegiatan promosi, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng memiliki 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 49 desa. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, dan sekitar 77% desa dan kelurahannya bertopografi dataran, yang berarti kebanyakan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Soppeng itu petani, pedagang, dan pegawai swasta. Kabupaten Soppeng ini mendapat julukan Kota Kalong karena ditempat ini banyak terdapat kelelawar di setiap

pohon yang ada di sepanjang kota ini, menurut mitos apabila pendatang dari luar Kabupaten Soppeng yang terkena kotoran kelelawar, maka jodohnya adalah orang Soppeng.

Kabupaten Soppeng adalah sebuah daerah yang mempunyai destinasi wisata yang cukup banyak dan beragam. Objek wisata di Kabupaten Soppeng tersebar di seluruh wilayah, baik itu wisata budaya maupun wisata alam yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun manca negara. Salah satu objek wisata di Kabupaten Soppeng yang memiliki prospek cukup potensial untuk dikelola dan dikembangkan adalah Desa Wisata Bulue Kecamatan Marioriawa, adapun yang menjadi objek wisatanya yaitu Pemandian Air Panas Lejja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan yang menjelaskan bahwa Desa Wisata termasuk destinasi wisata dalam skala kecil. Desa Wisata ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Soppeng setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng merujuk pada norma-norma agama dan nilai-

nilai budaya dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng menyangkut hubungan kehidupan yang berkeselimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Soppeng.

Orientasi pengembangan desa wisata seyogyanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini diperlukan kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya dukung memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang berkembang. Ini perlu

dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, bukan kerusakan.

Desa Bulue yang terletak di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebelah Barat Gunung Pangesore dan berjarak sekitar 49 km sebelah utara Kota Watansoppeng atau sekitar 14 km dari ibu kota Kecamatan Marioriawa. Desa Bulue merupakan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, dengan produk wisata andalannya yaitu Permandian air panas Lejja. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Soppeng selama ini terkesan masih belum memiliki pendekatan yang kuat. Pendekatan hal ini yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan (pemerintah daerah dan masyarakat) yang memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi.

Permandian Air Panas Lejja menyediakan fasilitas berupa kolam renang yang terbagi atas 2 bagian yaitu kolam renang umum dan kolam renang private, air bersih, listrik, toilet, ruang ganti pakaian, pondok peristirahatan seperti gazebo, villa serta baruga wisata sebagai tempat pertemuan dengan daya tampung 300 orang, areal parkir, jalan beraspal dan lain-lain. Adanya fasilitas tersebut membuktikan bahwa Permandian Air Panas Lejja sudah tidak dapat diragukan lagi. Tapi jika dilihat dari segi perawatan fasilitas, bisa

dikatakan pihak pengelola belum berhasil terbukti dengan adanya sebagian fasilitas yang mengalami kerusakan tapi tidak dilakukan perbaikan. Adapun sarana yang dimaksud penulis dalam hal ini seperti toilet, ruang ganti pakaian, papan seluncuran dan sebagainya. Rusaknya sarana dan prasarana pendukung di suatu objek wisata membuat wisatawan yang datang berkunjung merasa tidak nyaman dan itu bisa berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata Pemandian Air Panas Lejja. Kondisi seperti ini memang ironis mengingat potensi yang dimiliki objek wisata Pemandian Air Panas Lejja sangat menjanjikan, tapi belum dikelola secara optimal dan profesional. Dan wisata lainnya juga yang ada di Desa Bulue yaitu Air Terjun Mina Awoe yang belum terkelola dengan baik. Hal ini sudah semestinya menjadi perhatian yang serius dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

Sementara Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan berada di ketinggian 1000 MDPL. Sehingga memiliki panorama alam yang indah, udara yang sejuk dan asri. Terdapat hutan pinus yang dijadikan objek wisata bernama LEMBAH CINTA yang memiliki cerita romantis dari awal pembuatannya. Adapun wahana yang tersedia antara lain fasilitas outbound, Camp area, zona kopi lokal khas Desa Mattabulu, pengolahan gula aren, spot selfi dan tersedia Hamook dan aula

pertemuan. Selain wisata alam, juga terdapat air terjun yang dinamakan objek wisata LIU PANGIE. Liu Pangie memiliki wahana River tubing, spot foto dan area camp, panggung pertunjukan. Desa Mattabulu mempunyai koleksi flora: pohon aren, pangie dan pinus sedangkan fauna hewan endemika monyet tanpa ekor dan juga terdapat wisata budaya situs Petta Bulu Matanre, situs Petta Awo, situs Petta Abbanuange juga memiliki kesenian tradisional yaitu mappadendang dan musik gambus.

Dari uraian diatas, Pemerintah Daerah tentunya sangat berperan penting untuk mengembangkan Desa Wisata tersebut dalam hal pengembangan objek desa wisata, pemasaran desa wisata dan kelembagaan desa wisata. Untuk itu diperlukan Tindakan yang tepat oleh Pemerintah Daerah Soppeng sesuai dengan Peraturan Daerah Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 28 yang berbunyi Pemerintah Daerah Soppeng wajib mengembangkan Desa Wisata.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Soppeng”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam pengembangan Desa Wisata?
2. Faktor-faktor apakah mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Soppeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam pengembangan Desa Wisata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Soppeng.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah persepektif civitas Akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian Ilmu Pemerintahan dalam proses pengembangan desa wisata.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata, terkhusus bagi pemerintah daerah

dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran maupun evaluasi bagi semua pihak, sekaligus dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Manfaat Metodologis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam dan rinci sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang terjadi pada suatu penelitian. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, dibutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Kemudian landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Konsep Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Koziar Barbara, 2008)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) menjelaskan definisi peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.

- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015:215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarpribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2.2. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Faried dkk. (2015), mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh dalam melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan. Pemerintah sebagai suatu kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
3. Pemerintahan adalah perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan kehendak pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dua (2) hal, yaitu, pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara, sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Samuel Edward Finer mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit yakni

1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Menurut Miriam Budiardjo pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Muhadam Labolo, pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Menurut Haiyanta (1997), adapun fungsi dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian daya (power) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (powerless) menjadi memiliki kekuasaan (powerfull). Fungsi pemberdayaan membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri masyarakat, sehingga mereka

mempunyai daya atau kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Peranan pemerintah memang sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, karena melalui upaya, bantuan, dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang pada gilirannya rakyat menjadi lebih sejahtera penghidupannya (Sumodiningrat, 2000).

3. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Agustino, 2008).

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

2.3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi

pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri yaitu mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya. Selain diserahkan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahkan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan.
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja

menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1

angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah

provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum
2. Kepentingan hukum
3. Keterbukaan
4. Proporsionalitas
5. Profesionalitas
6. Akuntabilitas
7. Efisiensi
8. Efektivitas
9. Keadilan

2.4. Konsep Kepariwisata

Secara Etimologi kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sanskerta, Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini bersinonim dengan kata travel. Atas dasar tersebut pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris berarti tour (Yoeti ,1983:103)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan. Definisi dari wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.
2. Elemen Geografi. Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut ini :
 - a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
 - b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal

inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hongkong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

- c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'etre* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a) Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b) Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan

rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari kepariwisataan yaitu:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Menghapus Kemiskinan
- 4) Mengatasi Pengangguran
- 5) Melestarikan alam
- 6) Memajukan Kebudayaan
- 7) Memupuk rasa cinta tanah air
- 8) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 9) Mempererat Persahabatan bangsa

Berbicara tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (2003) dalam buku Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana adalah:

1. Wisata Budaya

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan

serupa ini disatukan dengan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan kegiatan budaya.

2. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas kesehatan lainnya.

3. Wisata Olah Raga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara, seperti Piala Sepak Bola Dunia, Olimpiade Olahraga, Kejuaraan Catur, dan Formula 1 dan lain lain.

4. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

5. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu kompleks satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

6. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Ibukota Jakarta, Pelantikan Presiden Amerika Serikat, dan sebagainya.

7. Wisata Konvensi

Wisata Konvensi adalah perjalanan yang dilakukan untuk melihat adanya sebuah konferensi yang dilakukan baik dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan ruangan tempat bersidang.

8. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

9. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagar alam atau hutan lindung

2.5. Konsep Pengembangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:538) memberikan arti pengembangan sebagai proses dan cara. Ditambahkan oleh Poerdarmita (2002:474) yang menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu mejadi maju, baik, sempurna dan berguna.

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari ; 2014)

Dari beberapa pendapat para ahli yang ada ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau

memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

2.6. Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Gamal Suwantoro (1997) mengklarifikasikan mengenai pola kebijakan pengembangan pariwisata yang meliputi:

- 1) Kebijakan Umum
- 2) Arah Pola Kebijaksanaan Pengembangan Jalur Wisatawan
- 3) Pola Kebijakan Pengembangan Objek Wisata
- 4) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 5) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
- 6) Kebijakan Pengembangan Industri

Menurut Pitana (2005:56) pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Mengingat pariwisata sebagai aspek penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengelolaan dan pengembangannya sangat perlu. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaanya.

Menurut Muljadi dan Warman (2014) prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka, antara lain:

1. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api.
2. Instalasi tenaga listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem perbankan moneter Sistem telekomunikasi.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (Attraction) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan.
2. Aksesibilitas (Accessibility) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi
3. Amenitas (Amenities) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
4. Fasilitas umum (Ancillary Service) yang mendukung kegiatan pariwisata

5. Kelembagaan (Institutions) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Salah satu upaya optimalisasi wilayah untuk memberikan dampak positif, baik pada aspek ekonomi maupun sosial budaya adalah melalui pembentukan Desa Wisata, yang di dalamnya tidak mengurangi esensi nilai-nilai kemanusiaan, tradisi, hingga ciri khas dari masyarakatnya. Desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata (Nuryanti dalam Yuliati & Suwandono, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa destinasi atau juga disebut sebagai daerah tujuan pariwisata terdiri atas unsur daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Keberhasilan pembentukan Desa Wisata dianggap menjadi upaya Pembangunan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata di desa juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat desa seperti wisata alam dan budaya (Holland, 2003 dalam Marimin,

2013). Pariwisata berkelanjutan mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di waktu yang akan datang” (Yoeti, 2008).

Pengembangan Desa Wisata nantinya akan mengelompokkan beberapa hal seperti usaha masyarakat, adanya potensi pengembangan unsur seni dan budaya, hingga menjadi pariwisata. Pengembangan Desa Wisata tidak serta merta berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui sejumlah tahapan mulai dari pembangunan hingga upaya promosi berkelanjutan. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata juga menjadi peluang dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL). PEL bertujuan memberdayakan orang-orang lokal, pemerintah lokal, dan industry industri lokal (Supriyadi, 2007).

Tujuan dari PEL merupakan keberhasilan pengembangan ekonomi lokal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha, perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran, dan keberdayaan Lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal.

2.7. Konsep Desa Wisata

Pariwisata merupakan sebuah komoditas ekonomi baru yang mulai dikembangkan. Dalam teori ekonomi yang lebih umum, keunggulan dari kompetisi pariwisata dinilai dari sisi permintaan. Seperti misalnya, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi disebabkan oleh pendapatan orang, populasi negara wisatawan, biaya hidup, biaya transportasi kedua negara, nilai tukar, dan inflasi. Untuk memiliki keunggulan komparatif, pariwisata harus mengubah segi pembangunan dari sisi permintaan ke penawaran. Destinasi wisata kerap dikunjungi dikarenakan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan nilai budaya Murphy (dalam Tjahjadi Michael Dkk 2016).

Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo mengacu pada keunggulan yang dimiliki setiap daerah atau negara. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa apabila dua negara melakukan perdagangan suatu komoditi yang bagi negara tersebut merupakan keunggulan komparatif karena negara tersebut berspesialisasi pada suatu komoditi, maka negara-negara tersebut akan mendapatkan keuntungan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keunggulan komparatif adalah dengan mengembangkan desa wisata. Menurut Nuryanti (Dalam Yulianti & Suwandono, 2016) desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang

dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Desa wisata adalah bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari desa wisata tersebut atau melakukan perjalanan wisata ke desa wisata. Unsur produk pariwisata terdiri dari angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Desa wisata adalah sebuah wujud kombinasi antara akomodasi, atraksi, dan sarana pendukung yang dikenalkan dalam sebuah tata kehidupan masyarakat yang menjadi satu dengan aturan dan tradisi yang berlaku. Sebuah desa bisa disebut desa wisata ialah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan, sebuah tradisi, dan kebudayaan yang menjadi ciri khas, aksesibilitas dan sarana prasarana yang mendukung program desa wisata, keamanan yang terjamin, terjaganya ketertiban, dan kebersihan. Dasar dalam pengembangan desa wisata ialah pemahaman tentang karakter dan kemampuan elemen yang ada dalam desa, seperti: kondisi lingkungan dan alam, sosial budaya, ekonomi masyarakat, struktur tata letak, aspek historis, budaya masyarakat dan bangunan, termasuk indigeneus knowledge

(pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dipunyai masyarakat. (Karangasem, dalam Yusuf A.Hilman Dkk 2018).

Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat sekitar dijadikan sebagai subyek aktif, artinya lingkungan sekitar dan kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut dijadikan sebagai tujuan wisata. Masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata serta inovator dalam memberikan ide gagasan pengembangan desa wisata. Menurut I. Pitana (dalam N. Nurhajati 2017), pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan merambah dan mengikutsertakan masyarakat, sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh kepada masyarakat setempat, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan desa wisata juga sebagai kegiatan pemberdaya

gunaan masyarakat dalam membangun desa secara bersama-sama. Motivasi desentralisasi memberikan kebebasan bagi warga untuk mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya merupakan metode untuk menciptakan pariwisata yang berbasis kelompok sosial masyarakat. Raharjana (Dalam Yusuf A. Hilman Dkk 2018). Tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga dengan mengimplementasikan konsep desa wisata ini menjadi salah satu wujud pariwisata yang ramah terhadap lingkungan di waktu mendatang (Juwita dalam Theofilus Retmana P, 2013).

Pengembangan desa wisata erat kaitannya dengan industri pariwisata. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. menurut R.S Darmajadi (Dalam Christina & Putri, 2014) tentang industri pariwisata adalah merupakan sekumpulan dari berbagai jenis bidang usaha, yang secara bersama memproduksi produk ataupun jasa-jasa atau layanan, baik secara langsung maupun akan diperlukan oleh wisatawan saat melakukan kunjungannya. Dengan berkembangnya desa wisata, akan memacu geliat industri pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan

selama mengunjungi destinasi wisata diperlukan kehadiran industri pariwisata sebagai penunjang kegiatan. Dalam konsep desa wisata, industri pariwisata yang mayoritas tersedia adalah restoran atau rumah makan, jasa transportasi, hotel atau penginapan

Desa Wisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Adapun peraturan ini mengikut pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan yang menjelaskan bahwa Desa Wisata termasuk destinasi wisata dalam skala kecil.

Lebih lanjut dijelaskan Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau Lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.

Desa wisata merupakan suatu desa yang dikembangkan melalui potensi yang dimiliki dan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya seperti transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan di pedesaan yang masih terjaga dan masih asri adalah salah satu faktor yang penting dalam desa wisata. Melalui desa wisata ini kegiatan yang dilakukan tidak ada yang berubah,

bahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa wisata tersebut menjadi sebuah ciri khas yang digunakan sebagai daya tarik dari desa tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menyajikan seluruh suasana dan menawarkan keaslian dan juga kekhasan dari desa tersebut sesuai dengan kegiatan masyarakatnya dan dapat dikembangkan potensinya menjadi sebuah pariwisata.

Adapun kriteria Desa Wisata harus memiliki beberapa faktor, diantara:

- 1) Mempunyai suatu potensi dan daya Tarik
- 2) Memiliki SDM yang mendukung
- 3) Mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat setempat
- 4) Sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Memiliki fasilitas yang mendukung aktifitas wisata
- 6) Memiliki kelembagaan dan struktur organisasi dalam pengelolaannya
- 7) Tersedianya area dan lahan yang dapat digunakan sebagai wisata

Suatu yang sedang dalam pengelolaan mempunyai tujuan tertentu, termasuk dalam pengelolaan dari desa wisata juga mempunyai tujuan. Menurut Hadiwijoyo (2012), diantaranya yaitu:

- 1) Digunakan untuk menggali potensi desa dengan cara mengangkat budaya lokal dalam rangka pembangunan masyarakat.
- 2) Memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk desa setempat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
- 3) Mampu menimbulkan rasa bangga dari masyarakat desa terhadap apa yang dimiliki sesuatu yang khas dari desa, dan menyebabkan penduduk tetap tinggal.
- 4) Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam program pembangunan pariwisata dengan menggunakan desa wisata

2.8. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder di dalam pengelolaah bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang menaungi bidang kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di daerahnya dengan cara mengembangkan daya tarik serta saran kepariwisataan lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

Menurut Subadra (2006) pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang pariwisata yaitu:

1. Perencanaan Pariwisata
2. Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan Pariwisata
4. Peraturan Pariwisata

2.9. Kerangka Pikir

Dalam pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata yang kemudian difokuskan pada dimensi objek wisata tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengukur seberapa berhasilnya pengembangan Desa Wisata Bulue dan Desa Wisata Citta Kabupaten Soppeng. Kerangka konsep diharapkan

mampu menjawab rumusan masalah yang ada tanpa melenceng dari fokus penelitian. Adapun kerangka konsep dari penulis sebagai berikut

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian ini dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

